

akum

# Pemerintah Tak Memulangkan

Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan tidak memulangkan teroris lintas batas Indonesia yang mendukung NIIS.

**BOGOR, KOMPAS** — Pemerintah akhirnya memutuskan tidak memulangkan para teroris lintas batas (*foreign terrorist fighters*/FTF) asal Indonesia dengan pertimbangan untuk memberi rasa aman kepada rakyat di Tanah Air. Akan tetapi, terhadap anak-anak di bawah usia 10 tahun yang dibawa orangtuanya atau yatim piatu, pemerintah akan mempertimbangkan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, sesuai rapat di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020), menyatakan, khusus anak-anak itu, kasusnya akan dilihat satu per satu. "Dikhawatirkan ada anak-anak yang pernah terlibat tembak-menembak dan terpapar ideologi teroris," kata Mahfud.

Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah menteri terkait serta Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhardi Alis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Aziz. Ratas juga dihadiri Wapres Ma'ruf Amin.

Mahfud menyebutkan, berdasarkan informasi, saat ini terdapat 689 teroris lintas batas asal Indonesia yang berada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lain. Namun, Indonesia punya data, yang masih divalidasi. Sejauh ini, tercatat 228 orang yang sudah teridentifikasi. "Pemerintah tak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan, tidak akan memulangkan FTF. Meski demikian, pemerintah akan menghimpun data yang lebih valid soal jumlah dan identitas mereka yang dianggap bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS)," tutur Mahfud.



KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020), menyampaikan, pemerintah tidak akan memulangkan teroris lintas batas negara asal Indonesia. Keputusan diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri juga oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana mengatakan, anak-anak yang mengikuti latihan militer dan bersumpah setia kepada NIIS sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Jika anak-anak berusia di bawah 10 tahun akan dipulangkan ke Indonesia, kata Hikmahanto, pemerintah harus menyeleksi secara ketat untuk memastikan mereka tidak pura-pura insaf dan kemungkinan membangun

kembali sel-sel terorisme di Indonesia dan negara sekitarnya.

## Permintaan NU

Sebelumnya, ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang datang ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, PBNU berharap agar pemerintah tidak memulangkan WNI yang pernah mendukung NIIS.

Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, PBNU menolak wacana pemulangan

para pendukung NIIS ke Tanah Air. "Dalam Al Quran, Nabi Muhammad SAW diperintahkan mengusir para pembuat kegaduhan. Orang yang buat gaduh, usir dari Madinah. Jangan sampai mengganggu," ujarnya.

Para pendukung NIIS yang kini ditahan di Suriah dan Irak, menurut Said, adalah pembuat gaduh. Bahkan, mereka mendukung teror dan tindakan keji lain yang tak sesuai Islam. "Untuk apa memikirkan pemulang-

an jika dampaknya membuat gaduh, mengganggu 260 juta WNI di Indonesia?" tuturnya.

Mereka, kata Said, juga mengancam orang-orang Indonesia. Bagi mereka, Indonesia adalah negara kafir dan harus diperangi. Mereka memfitnah dan mengkhianati NKRI, di antaranya membakar paspor sebagai bukti kewanegaraan.

## Ancaman politik identitas

Saat berbicara di depan Parlemen Australia di Canberra, Senin (10/2), Presiden Jokowi mengemukakan, politik identitas merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, selain juga ancaman bagi kemajemukan dan toleransi. Ancaman ini semakin nyata jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan, bahkan konflik sosial.

Oleh karena itu, menurut Presiden, setiap bangsa harus terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan.

"Meskipun budaya Indonesia dan Australia berbeda. Namun, kita memiliki nilai-nilai yang sama, kemajemukan, keberagaman, etnis, dan toleransi, demokrasi, dan penghormatan hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup," papar Presiden.

Sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, RI-Australia harus bekerja keras, bahu membahu, berdiri tegak memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan kemajemukan, dan mencegah dunia dari ancaman *clash of civilization*.

(INA/BOW/RAZ/DEA/LAS)



# Kepulangan Teroris Lewat Jalur Gelap Diawasi

Pemerintah tak mau kebobolan kepulangan para teroris lintas batas lewat jalur mandiri ataupun ilegal. Untuk itu, verifikasi perlu dilakukan secara rinci dan valid.

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun menolak pemulangan teroris lintas batas (*foreign terrorist fighters/FTF*) asal Indonesia, pemerintah tak mau kebobolan. Sejumlah tindakan akan diambil untuk mengantisipasi jika mereka pulang lewat jalur mandiri ataupun ilegal. Karena itu, verifikasi terhadap identitas FTF penting untuk diketahui secara rinci dan lengkap oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo sesuai melantik Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Aan Kurnia, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020). "Pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk. Itulah yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tak punya rencana memulangkan orang-orang WNI di sana (FTF)," tutur Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, keputusan itu diambil dengan pertimbangan, antara lain, para teroris lintas batas itu semestinya bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri pergi ke Suriah dan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia.

Sehari sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, diputuskan tidak memulangkan para FTF asal Indonesia. Dalam rapat itu, selain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hadir pula sejumlah menteri terkait serta Panglima TNI dan Kepala Polri (Kompas, 12/2/2020).

Untuk mencegah kembalinya 689 orang FTF dengan berbagai cara, termasuk lewat negara tetangga yang memiliki fasilitas jalur bebas visa dengan Indonesia, Presiden Jokowi meminta agar verifikasi dilakukan rinci, mulai dari nama, asal-usul,



Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meninggalkan ruang pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (12/2/2020). Mereka mengadakan pertemuan tertutup membahas sejumlah isu, termasuk konsistensi Indonesia mendukung perjuangan Palestina.

dan data lainnya. Sejauh ini, tercatat 228 orang FTF yang sudah didata. Dengan data yang lengkap, pengawasan hingga pencegahan bisa dilakukan optimal.

Terkait dengan anak-anak usia di bawah 10 tahun yang dibawa orangtua mereka bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah juga mengidentifikasi mereka. "(Namun) kita belum tahu apa ada atau tidak," ujar Presiden Jokowi.

## Akan ditangkap

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menambahkan, FTF

yang mencoba masuk ke Indonesia melalui jalur gelap akan ditangkap. Untuk itu, antisipasi dilakukan sejak dini.

Lebih jauh Mahfud mengatakan, berdasarkan data yang dirangkum CIA, BNPT, BIN, dan lainnya, kini terkonfirmasi ada sebanyak 689 orang FTF asal Indonesia termasuk anak-anak. "Mereka (anak-anak) diperkirakan belum terpapar ideologi NIIS, tetapi perlu kontradikalisasi sebelumnya," kata Mahfud. Ia tak merinci seperti apa langkah tersebut.

Adapun Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan, pemerintah perlu mendata ter-

lebih dahulu para FTF. Hal itu karena WNI eks NIIS ada tiga kategori.

Pertama, mereka yang ke Suriah dan menjadi kombatan secara ideologis. Kedua, mereka yang menjadi kombatan karena alasan pragmatis akibat iming-iming gaji tinggi, tetapi tak punya ideologi kuat.

Ketiga, mereka yang hanya karena ikut-ikutan atau bahkan tertipu oleh anggota keluarga atau teman. Mereka sama sekali tak terlibat sebagai kombatan, sebagian dari mereka malah jadi korban kekerasan.

## Tak semua dipulangkan

Sebagian WNI yang terlibat menjadi anggota NIIS pun, me-

nurut Mu'ti, terdiri atas tiga jenis. Pertama, ada yang punya paspor Indonesia dan mendukung Pancasila serta UUD 1945. Kedua, mereka yang punya paspor Indonesia, tetapi anti Indonesia dan Pancasila. Ketiga, mereka yang tak lagi punya paspor Indonesia dan tidak menjadi WNI.

Namun, tidak semua eks NIIS harus dipulangkan. "Mereka yang tak lagi menjadi WNI tidak perlu diurus. Mereka yang masih WNI dan ingin kembali perlu difasilitasi. Pemulangan bersifat sukarela. WNI yang tidak setia kepada Pancasila dapat kembali dengan beberapa syarat dan pembinaan khusus," tutur Mu'ti. (INA/NTA)

## 6 | Opini

e-mail: [opini@kompas.id](mailto:opini@kompas.id)

### T A J U K R E N C A N A

#### Langkah Tegas Pemerintah Sikapi NIIS



emerintah memutuskan tidak akan memulangkan orang-orang asal Indonesia yang dianggap terlibat bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah.

Langkah tegas ini diambil sebagai upaya memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 267 juta karena pemerintah menilai mereka sebagai teroris lintas batas (*foreign terrorist fighters*).

Meski demikian, pemerintah tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dengan tidak mengambil sikap main pukul rata. Pemerintah akan mempertimbangkan kemungkinan memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang dibawa orangtuanya atau menjadi yatim piatu. Ini sejalan dengan seruan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Keputusan rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Bogor pada 11 Februari 2020 itu sekaligus meredakan perdebatan di publik terkait wacana pemulangan 689 warga asal Indonesia yang berada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lain.

Hal terpenting, keputusan pemerintah ini menunjukkan sinyal kuat kepada seluruh elemen bangsa. Pertama, tegas menolak terorisme dalam berbagai bentuknya. Kedua, menjunjung tinggi status kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) hingga saat ini oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai sebagai pusat ancaman terorisme transnasional meskipun sudah kehilangan benteng terakhirnya di Suriah dan Irak serta pemimpinnya.

Terkait status kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur hak dan kewajiban secara seimbang. Pasal 27 (1) menyebutkan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Undang-undang juga mengatur kesetiaan pada negara, yaitu bersumpah dan berjanji untuk melepaskan seluruh kesetiaan kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sorang WNI pun akan hilang kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; atau secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut (Pasal 23).

Keputusan telah diambil. Berikutnya, langkah yang dilandasi prinsip kemanusiaan dan hati-hati perlu dilakukan secara terpadu dalam melihat satu per satu kasus.



# Menolak Kombatan NIIS

A Helmy Faishal Zaini

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Riuh perdebatan soal wacana pemulangan kombatan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) ke Tanah Air menguras energi kita.

Pertanyaan mendasarnya, apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menyikapi wacana ini? Jawabannya memang tak mudah, tetapi dengan piranti metodologi berpikir yang jernih dan argumentatif, saya rasa persoalan ini akan bisa dilihat secara jernih. Jika kita berkaca pada sejarah, serangan-serangan yang dilakukan NIIS atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), menyebabkan ribuan jiwa meninggal. Sejak berdiri, NIIS telah meneror tak kurang dari 33 negara, lebih dari 228 kali melakukan serangan dan telah menewaskan tidak kurang dari 3.000 jiwa. Data ini bisa dijadikan argumen kuat sesungguhnya bibit radikalisme bisa bersemai di mana saja, dari negeri yang paling fasid sampai negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.

Pada negeri yang terakhir ini, menarik untuk kembali mengungkapkan hasil temuan Jack Snyder (1999), guru besar Universitas Columbia (New York). Dalam bukunya bertajuk *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, ia menuliskan sejarah demokrasi adalah bentangan sejarah konflik, kekerasan, dan juga radikalisme. Perang-perang yang merupakan puncak kekerasan di dunia, seperti perang Napoleon (1803-1815), perang Kaisar Wilhelm (1914-1918), dan juga perang Adolf Hitler (1939-1945), sebagian besar disebabkan oleh usaha untuk menuju demokratisasi itu sendiri.

Tesis Snyder ini bisa dijadikan landasan kuat bahwa sesungguhnya kekerasan itu bisa bersemai di mana saja, termasuk di negara yang demokratis sekalipun. Bahkan, lebih jauh soal radikalisme ini, Karen Armstrong (2007) dalam *The Battle for God* mengatakan bahwa radikalisme ada di hampir semua agama. Di setiap kepercayaan, apa pun

itu bentuknya terlebih agama, hampir bisa dipastikan ada barang satu atau dua gerakan yang lebih bersikap fundamentalis yang kemudian gerakannya diekspresikan dengan cara-cara kekerasan (radikalisme).

## Bahaya radikalisme teroris

Pada tataran inilah saya ingin memberikan garis demarkasi antara fundamentalisme dan radikalisme yang dalam bahasa agama kerap diistilahkan sebagai *"Syiddah Al-Tanattu"*. Dalam hemat saya, fundamentalisme adalah abstraksi pemahaman yang domain wilayahnya ada di pikiran. Sementara itu, radikalisme adalah tindakan turunan yang dilahirkan dari pola pikir fundamentalis itu. Artinya, fundamentalisme itu soal pikiran, sedangkan radikalisme itu soal tindakan.

Lebih jauh soal radikalisme, Said Aqil Siroj (2014) pernah mengemukakan analisis menarik. Ia berpendapat, sesungguhnya radikalisme hari ini telah terfragmentasi jadi minimal tiga bentuk dan varian. Pertama, radikalisme puritan. Radikalisme macam ini lebih menitikberatkan kegiatannya dalam rangka memurnikan ajaran Islam dari tradisi-tradisi yang lokal. Kedua, radikalisme sekuler. Radikalisme ini banyak mengonsentrasikan gerakannya untuk mengislamkan segala sistem sekuler, seperti demokrasi, sistem politik, dan juga bentuk negara. Terakhir, radikalisme teroris yang mengejawantahkan seluruh konsep dan pikiran serta pandangannya dengan cara pemaksaan yang dibungkus kekerasan.

Sesungguhnya, jika kita telaah lebih jauh dua bentuk pertama dari fragmentasi radikalisme itu, kita akan menemukan bahwa gerakan radikalisme berada sebatas konsep dan alam pikir pengikutnya semata. Mungkin juga kedua bentuk itu diwujudkan dalam bentuk gerakan, tetapi tak sampai menggunakan kekerasan sebagai alat gerakannya. Pada kedua bentuk itu, kadar dan taraf bahaya radikalisme tak sebesar yang ada pada radikalisme dalam bentuk ketiga, yakni radikalisme teroris yang



selalu istikamah menjadikan teror dan kekerasan sebagai pengejawantahan gerakan serta cara untuk menerjemahkan gagasannya. Pada bentuk ketiga inilah, NIIS memanifestasikan gerakannya.

Lebih menyedihkan, paham teroris itu jika kita cermati dengan teliti, sesungguhnya mereka bisa berkembang dengan sangat cepat justru dengan cara memanfaatkan lahan subur yang bernama kebebasan yang dikenal dalam sistem demokrasi. Kebebasan berargumentasi dan juga kebebasan berekspresi, salah satu ciri utama demokrasi itulah yang menjadi medan pacu landas serta alasan kemunculan paham radikalisme berwujud terorisme tersebut di negara-negara penganut paham demokrasi.

Gerakan radikalisme seperti apa pun dan dalam bentuk bagaimanapun tidak pernah dibenarkan oleh agama. Atas dasar itulah, Nahdlatul Ulama (NU) menjadi garda depan yang menolak paham-paham Islam radikal, seperti NIIS, berkembang di Indonesia. Apalagi, sejak dini kami mengenal diktum *hubbul wathon minal iman*, cinta Tanah Air adalah sebagian dari bentuk keimanan, maka jelas kami lebih mencintai Indonesia dibandingkan Irak dan Suriah.

## Dua pendekatan

Lebih jauh, dalam konteks wacana pemulangan kombatan NIIS, setidaknya ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam melihat persoalan ini. Pertama, pendekatan legal formal dengan piranti undang-undang (UU). Dalam konteks wacana pemulangan kombatan NIIS ini, jika merujuk pada UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pada Pasal 23 disebutkan secara eksplisit bahwa "warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden".

Konteks Pasal 23 UU No 12 Tahun 2006 ini dalam hemat saya selaras de-

ngan yang sedang kita hadapi bersama hari ini. Jelas bahwa status kewarganegaraan para kombatan tersebut sudah tanggal sejak mereka berbaiat ke NIIS.

Di samping itu, pendekatan kedua, dalam hemat saya, kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai kerangka metodologi berpikir ala pesantren. Pendekatan ini terdiri dari rangkaian dan susunan argumen yang bisa dijadikan alas pikir dan alas landas untuk mengambil keputusan terbaik.

Satu, di dalam Al Quran surat Al-Ahzab Ayat 60 Allah berfirman, *"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar."* Titik tekan ayat ini ada pada pengertian dan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengusir mereka yang membuat fitnah, keonaran, dan juga termasuk teror dari kota Madinah. Dalam Islam, melalui ayat ini, kita dapat mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang berbuat teror dan mengusik tatanan kehidupan.

Dua, kita mengenal kaidah-kaidah *dar'ul mafsid muqaddamun al jalbil mashlih* yang berarti: menolak kerusakan lebih didahulukan dan diutamakan dibandingkan mendatangkan kemashlahatan. Sikap preventif dan kehati-hatian adalah kunci dalam bertindak. Maka, dalam konteks wacana pemulangan kombatan NIIS ini, yang lebih kita dahulukan adalah mencegah datangnya kerusakan atau kemudharatan berupa ancaman dan potensi teror dibandingkan mendatangkan kemashlahatan dengan pertimbangan kemanusiaan. Dengan kerangka berpikir yang jelas dan juga pendekatan komprehensif, saya rasa kita akan bisa lebih jernih melihat persoalan. Kejernihan melihat persoalan akan menjadi modal penting untuk mendasari pengambilan kebijakan. *Wallahu a'lam bi showab*.



# Bahaya Pemulangan Eks NIIS

Dete Aliah  
Peneliti Terorisme

**Gelombang penolakan masyarakat terhadap fenomena WNI eks Negara Islam di Irak dan Suriah yang minta pulang ke Indonesia begitu kuat. Pemerintah sendiri telah memutuskan tak akan memulangkan kombatan NIIS demi keamanan 260 juta rakyat di Tanah Air.**

Penolakan masyarakat di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal ini dengan membawa-bawa agama sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Masyarakat masih ingat hingga kini bagaimana aksi bom gereja di Samarinda melalui seorang anak balita berumur tiga tahun, Trinity Hutahean, juga Alvaro Aurelius Tristan Sinaga dan Anita Kristobel. Balita yang tak berdosa itu hingga kini harus menanggung sakit dan kerusakan fisik akibat perbuatan para pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) ini.

Masyarakat juga masih mengingat bagaimana kejiannya perbuatan kelompok NIIS ini ketika mereka membantai lima polisi di Mako Brimob. Video yang tersebar menunjukkan betapa biadabnya perbuatan mereka ini. Para korban bom juga masih menderita hingga saat ini dan harus minum obat sepanjang hidup untuk menghilangkan rasa sakit yang masih mereka rasakan sekalipun peristiwa pengepungan itu sudah terjadi beberapa tahun lalu.

Yang jadi kekhawatiran masyarakat adalah ke-600 orang—data belum valid apakah benar 600 karena pihak keamanan juga belum yakin dengan angka ini—bisa menjadi bibit teroris baru yang akan melakukan aksi-aksi kekerasan dengan dalih agama untuk mewujudkan mimpi mereka yang belum selesai. Terlebih lagi di Indonesia sendiri banyak kelompok teroris yang berafiliasi dengan NIIS, seperti Jamaah Anshoru Daulah (JAD), Jamaah Anshoru Khilafah (JAK), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan kelompok-kelompok sempaiannya, yang mungkin akan menarik orang-orang yang pulang ini untuk bergabung dan mewujudkan mimpi khilafah mereka di negeri ini.

Kita masih ingat ketika kelompok NIIS mengeluarkan fatwa "bila kalian tidak bisa berjihad ke Suriah karena aturan yang membuat kalian tidak bisa berjihad ke Suriah, maka lakukanlah jihad di negeri kalian masing-masing", dan dengan fatwa ini, anggota NIIS di Indonesia melakukan aksi terorismenya di dalam negeri. Tidak menutup kemungkinan fatwa yang sama akan dikeluarkan dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia bila jumlah pendukung ISIS yang sudah ada di Indonesia ditambah 600 orang yang akan dipulangkan ini. Kelompok yang akan mendapatkan "amunisi" baru untuk meneruskan jihad dan perangnya. Kekha-

watiran inilah yang membuat gelombang penolakan sangat kuat karena trauma yang belum selesai terhadap aksi-aksi kekerasan yang menelan banyak korban ini.

## Belajar dari deportan

Tak dimungkiri memang banyak motif yang mendorong orang-orang Indonesia hijrah ke Suriah. Dari yang ingin hijrah ke Suriah sebagai warga negara atau ingin bergabung dengan kelompok NIIS untuk bersama-sama dengan NIIS berjuang membela kaum Sunni yang dibantai Syiah seperti narasi propaganda mereka. WNI ini tidak hanya bergabung dengan NIIS karena di Suriah ada banyak faksi, seperti faksi yang berafiliasi dengan Al Qaeda, Jabat Nushra.

Motivasi mereka memang sangat bervariasi, dari yang skala radikal rendah sampai ke skala tinggi. Namun, motifnya untuk hijrah ini sebenarnya dilandasi oleh kesadaran penuh dan pilihan sadar bahwa mereka tidak ingin lagi jadi warga negara Indonesia dengan berbagai alasan. Alasan utama mereka berhijrah nyaris seragam, yakni menganggap Indonesia adalah negara *darul kufur*, yang tidak menerapkan aturan atau undang-undang (UU) Tuhan, tetapi menggunakan UU buatan manusia dan banyak praktik bernegara yang melanggar aturan, yakni hukum dirasa lebih tajam ke bawah dibandingkan ke atas. Karena menganggap Indonesia sudah penuh dengan kemungkaran dan makisat, dengan sukarela dan bahkan dengan menjual harta benda yang mereka miliki, mereka melakukan hijrah dan berniat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Sayangnya, mimpi itu karam di tengah jalan karena Pemerintah Turki menanggapi mereka dan mendeportasinya ke Indonesia.

Kementerian Sosial mendapat mandat menempatkan para deportan ini dan di panti milik Kemensos inilah mereka menjalani rehabilitasi selama 3-4 minggu dan bahkan ada yang lebih dari sebulan. Dari asesmen yang dilakukan kepada para deportan ini, sebanyak 40 persen menyatakan masih ingin kembali lagi ke Suriah. Ini menandakan, sekalipun mereka sudah dideportasi dan ditahan di penjara Turki dan menjalani proses rehabilitasi, semangat (*ghirah*) mereka untuk bergabung dengan NIIS atau kelompok lain di Suriah belumlah padam. Hal ini terbukti dari beberapa deportan yang melakukan "jihad" mereka di Indonesia setelah mereka dipulangkan ke rumah masing-masing pasca-rehabilitasi.

Young Farmers dan Anggi Kusuma adalah dua orang deportan yang berencana membuat bom kimia di Bandung untuk aksi "jihad" mereka. Sementara Rullie Rian Zeke dan istrinya, Ulifah Handayani Saleh, adalah dua orang deportan yang melakukan aksi bom bunuh diri di gereja di Sulu, Filipina Selatan. Tito Karnavian, pada saat itu masih menjabat sebagai Kapolri, pada saat peristiwa bom Surabaya menyatakan bahwa otak (*mastermind*) dari aksi kejam ini adalah Khalid Abu Bakar, salah seorang deportan yang juga menjalani proses rehabilitasi di panti yang sama dengan

Young Farmers, Rullie, dan lainnya. Ini menandakan, sekalipun proses rehabilitasi sudah diberikan kepada para pendukung NIIS ini, semangat jihad mereka tidaklah padam dan bisa melakukan jihad ini tak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain.

Para deportan ini belum masuk ke Suriah dan belum terpapar lebih jauh dengan ideologi para kombatan di Suriah, tetapi semangat mereka tak kalah dengan mereka yang sudah hijrah ke Suriah. Bisa dibayangkan seperti apa ideologi WNI yang sudah menetap lama di Suriah dan terlebih lagi yang sudah bergabung dengan NIIS dan melakukan perang langsung bersama-sama dengan kelompok ini. Tidak berbahaya kelompok ini bagi republik ini?

## PR pemerintah

Junaedi, salah seorang WNI yang pernah bergabung dengan NIIS dan menetap di Suriah selama enam bulan, berhasil kembali ke Indonesia dan kembali hidup bersama dengan masyarakat. Junaedi tak kembali sendirian ke Indonesia, tetapi bersama rombongan yang berangkat bersama-sama dengannya. Meski demikian, selang enam bulan setelah kepulangan, Junaedi ditangkap Densus untuk menjalani proses hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Belajar dari pengalaman Junaedi, tak tertutup kemungkinan banyak WNI yang juga sudah pernah bergabung dengan NIIS dan kelompok teroris lain di Suriah juga sudah ada yang kembali ke Indonesia. Mereka yang kembali ini ada yang terdeteksi, seperti Junaedi dan teman-temannya, tetapi ada juga yang tidak terdeteksi dan tidak melewati proses hukum. Untuk yang terdeteksi akan mudah diawasi, terlebih bila mereka sudah melewati proses hukum.

Pertanyaannya, bagaimana yang sudah kembali tetapi tak terdeteksi? Apakah pemerintah bisa memantau pergerakan orang-orang ini? Dan apakah WNI eks NIIS yang meminta kembali pulang ini ada yang sudah kembali melalui "pintu belakang" dan tanpa diketahui pemerintah? Pendataan menjadi sebuah keharusan dan harus segera dilakukan untuk mengetahui berapa sesungguhnya jumlah orang Indonesia yang tersebar di beberapa kamp pengungsi di Suriah. Angka 600 orang adalah angka yang belum pasti karena masih simpang-siur. Dari pendataan bisa diketahui apakah ada yang sudah pulang ke Indonesia, siapa saja mereka, dan apa yang dilakukan di Indonesia. Ini sangat penting mengingat bila ada yang sudah pulang, monitoring intensif terhadap orang-orang tersebut harus dilakukan.

Ada hal yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa dalam kelompok NIIS ini atau kelompok radikal lain di Suriah, orang-orang yang pernah pergi ke Suriah dan terlebih yang ikut berperang bersama NIIS akan dianggap sebagai "pahlawan" dan figur yang dihormati. Mereka dianggap memiliki keahlian yang mum-

puni dan karenanya pantas untuk dijadikan pemimpin. Bila para WNI yang "pulang" didapuk dengan penghormatan yang seperti ini oleh kelompok mereka, bisa jadi dukungan ini akan kembali memompa semangat jihad mereka dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi-aksi kekerasan di Tanah Air.

Kita juga tak bisa menutup mata akan semangat "mengkhilafkan" Indonesia oleh organisasi-organisasi yang mengaku "nonkekerasan" yang belum padam hingga hari ini. Organisasi-organisasi ini dan para WNI eks NIIS memiliki kesamaan visi dan misi dan bila mereka bersatu akan jadi kekuatan baru. Kekuatan baru ini tak hanya memiliki semangat sama untuk "mengkhilafkan Indonesia", tetapi mereka juga sudah dibekali kemampuan tempur dan strategi perang yang dipelajari saat tinggal di Suriah. Keputusan memulangkan atau tidak adalah keputusan penting yang harus dipertimbangkan dengan matang dan menimbang berbagai aspek. Hak asasi WNI yang hijrah ke Suriah ini memang harus dijamin, tetapi keselamatan warga dari potensi tindakan kekerasan ekstrem dan juga keamanan negeri ini jauh lebih penting untuk dipikirkan.

Karena itu, pemerintah harus memikirkan hal ini dengan sangat hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Melakukan pendataan dan asesmen adalah langkah awal yang bisa ditempuh. Pendataan untuk mengetahui jumlah riil WNI yang hijrah dan bergabung dengan berbagai kelompok radikal di Suriah dan asesmen diperlukan untuk mengetahui tingkat radikalisme setiap individu yang ingin kembali itu. Hasil asesmen ini yang menjadi dasar pertimbangan apakah orang-orang ini perlu dipulangkan atau tidak.

Mengingat radikalisme tidak bisa diukur dengan penampilan karena radikalisme ini adanya di alam pikiran, maka asesmen yang dilakukan harus benar-benar dalam dengan menggunakan berbagai metode dan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Pemerintah tidak lagi boleh terjebak pada tanda tangan selembarnya pernyataan kesetiaan pada NKRI karena bisa jadi mereka bersedia menandatangani perjanjian atau lembar kesetiaan tersebut hanya untuk kebutuhan pragmatis, yang penting pulang. Kesetiaan pada NKRI diukur dengan tindakan, bukan dengan selembarnya surat pernyataan. Karena itu, pemerintah harus membangun alat ukur yang lebih baik, yang bukan sekadar seremonial dan ada, tetapi yang benar-benar bisa menjadi jaminan bahwa orang itu benar-benar berubah dan tidak akan lagi melakukan keonaran dengan alasan apa pun.

Pemerintah sudah cukup sibuk menghadapi kelompok teroris yang kini ada di Indonesia. Dan, kita tidak berharap melihat aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama kembali terjadi di negeri ini. Karena itu, pertimbangan yang hati-hati dan menyeluruh perlu dilakukan dan pembelajaran dari penangan deportan bisa menjadi bahan acuan dalam menimbang keputusan itu. Kita tak ingin melihat korban aksi kekerasan bertambah dan seharusnya Indonesia bisa jadi rumah yang aman bagi setiap warganya.



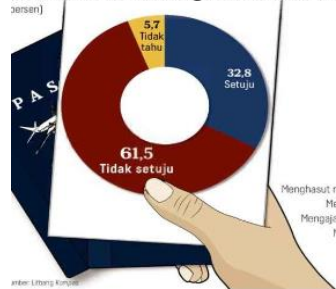
HERVUNANTO



# Lindungi Negara dari Terorisme

Keputusan pemerintah tak memulangkan WNI eks anggota NIIS dinilai masuk akal di tengah trauma publik terhadap ancaman terorisme. Mengurangi potensi terorisme lebih menonjol sebagai alasan meski sisi kemanusiaan tak bisa ditanggalkan.

Setuju atau tidak setuju? Anda jika WNI eks NIIS dipulangkan ke Indonesia setelah NIIS mulai mengalami kekalahan?



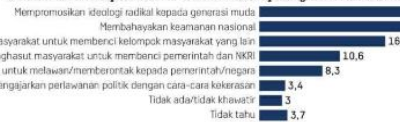
Jika Anda setuju, apa alasannya?



Jika Anda tidak setuju, apa alasannya?



Kekawatiran Responden Jika WNI eks NIIS dipulangkan ke Indonesia



Setuju atau tidak setuju? Anda jika WNI eks NIIS, apabila...



Sudah tepat atau tidak tepat? langkah Presiden Joko Widodo untuk bersikap hati-hati dalam menangani pemulangan WNI eks NIIS ini?



Penelitian Pewarna: Pengumpulan pendapat dilakukan di lingkungan Universitas Kompas pada 12-13 Februari 2020. Sampel 520 responden berusia minimal 17 tahun berlatar belakang pendidikan menengah ke atas di 17 kota besar di Indonesia, yaitu: Bandung, Bekasi, Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Semarang, Tangerang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Port Moresby, Samarinda, Pekanbaru, Manado, Kerteh, dan Ampang. Jumlah responden: 520 orang dengan komposisi 50 laki-laki dan 50 perempuan. Responden dipilih secara acak menggunakan metode undian. Hasil yang disajikan di sini merupakan rata-rata dari seluruh responden. Margin of error: ± 3,5%.

Sajak rencana kepulangan teroris pelintas batas (foreign terrorist fighter/FTF) asal Indonesia mencuat, polemik tentang status mereka berkembang cepat. Mayoritas pendapat mengindikasikan mereka tak dipulangkan ke Indonesia. Publik menilai sikap pemerintah untuk lebih berhati-hati menghadapi polemik tersebut sudah tepat.

Reaksi publik terhadap wacana pemulangan mantan kombatan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) asal Indonesia ini terakam dalam jajak pendapat Kompas pekan lalu. Hasil jajak pendapat mengungkap kehendak publik agar para teroris tak dipulangkan ke Tanah Air. Enam dari 10 responden dengan tegas menolak jika mereka dipulangkan setelah NIIS kalah.

Resistensi yang kuat ini dilandasi alasan keamanan nasional, ideologi, dan status kewarganegaraan. Sebanyak 36,5 persen responden menolak teroris pelintas batas asal Indonesia ini karena berpotensi membahayakan keamanan nasional. Selain itu, bahaya ideologi yang ditamamkan NIIS kepada mantan pengikutnya ini menjadi alasan penolakan dari 30,1 responden.

Sementara 14,1 responden lainnya menganggap hilangnya status kewarganegaraan sebagai WNI menjadi alasan menolak para mantan teroris. Pasalnya, mereka sudah membakar paspor Indonesia dan bersumpah setia kepada NIIS sekaligus ikut berjuang dan terlibat dalam aksi-aksi kekerasan yang diinisiasi organisasi teroris tersebut.

Jumlah teroris pelintas batas berkewarganegaraan Indonesia memang terlalu kecil jika dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia yang kini 260 juta lebih. Namun, pengalaman tempur dan militansi yang diajarkan, menjadi potensi kekuatan mereka yang boleh jadi melahirkan ketakutan masyarakat lainnya. Ketakutan akan potensi kekejaman dan terorisme inilah yang menjadi muara kekhawatiran publik jika teroris pelintas batas dipulangkan.

Tak heran jika alasan ketakutan masyarakat inilah yang dirasakan pemerintah ketika memutuskan menolak kepulangan para kombatan itu. Apalagi, Pengurus Besar Nahdlatul

Ulama selaku ormas Islam terbesar sudah lebih dulu menyampaikan penolakannya. Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj, pendukung NIIS yang kini ditahan di Suriah dan Irak adalah pembuat gaduh. Mereka mendukung teroris dan tindakan keji yang tak sesuai agama, khususnya Islam (Kompas, 12/2/2020).

Kekawatiran

Keputusan pemerintah tak memulangkan teroris pelintas batas pendukung NIIS cenderung disponsori oleh publik. Hampir semua kalangan sepakat dengan keputusan tersebut. Mayoritas pendapat mendukung alasan pemerintah tak memulangkan mantan teroris ini karena untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemerintah khawatir para terduga eks NIIS ini akan menjadi teroris baru di Indonesia. "Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan teroris pelintas batas ke Indonesia," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai rapat di Istana Bogor.

Dalam jajak pendapat ini, publik juga mengungkapkan kekhawatiran terkait eksistensi mereka kelak jika kembali ke Indonesia. Hal yang paling dikhawatirkan adalah bahaya ideologi yang ditamamkan NIIS. Sebanyak 28,7 persen responden menyatakan, mantan pejuang NIIS ini berpotensi mempromosikan ideologi kekerasan yang diproduksinya kepada generasi muda.

Karakter NIIS yang menebar kebencian dan teror kepada musuh-musuhnya diyakini berpengaruh kuat kepada para pengikutnya meskipun mereka sudah keluar. Potensi menanamkan kebencian ke kelompok masyarakat lain, bahkan kebencian kepada pemerintah, bukan perkara sulit bagi mereka. Eks kombatan NIIS ini juga memiliki kemampuan mengajarkan cara-cara kekerasan yang mereka pelajari ke generasi muda. Bahkan, jika semua lini dikuasai, mereka bisa dengan mudah menghasut untuk memberontak melawan pemerintahan yang sah.

## JAJAK PENDAPAT KOMPAS

Tulah bentuk-bentuk kekhawatiran yang diungkapkan responden ketika disintil pertanyaan soal tanggapan mereka jika para simpulan NIIS dipulangkan ke Indonesia. Citra NIIS sebagai organisasi teroris yang kejam menjadi pengetahuan umum yang terakam dengan baik dalam memori publik. Salah satunya, perilaku NIIS yang kerap kali mempertontonkan kekejaman secara terbuka melalui tayangan video, dan menyimpan potensi mereproduksi kembali ajaran kekerasan.

Dengan citra seperti itu, mayoritas publik enggan menerima kehadiran para pengikut

NIIS sebagai warga. Meskipun demikian, jajak pendapat juga mengungkap adanya perbedaan sikap terkait penerimaan terhadap para simpulan NIIS. Lebih dari separuh bagian (57,4 persen) responden secara tegas menyatakan tak bersedia menerima mereka tinggal dalam satu lingkungan.

Kelompok responden lainnya cenderung terbuka. Kelompok ini terbagi dalam dua kategori penerimaan. Kategori pertama responden yang bersedia menerima seperti keberadaan mereka sebelum bergabung dengan NIIS. Artinya, WNI eks NIIS ini bisa diterima untuk tinggal bersama tanpa syarat apa pun. Responden dengan kategori ini sebanyak 17,7 persen.

Kategori kedua, responden yang bersedia menerima, tetapi harus dengan syarat yang sangat ketat. Pertama, mantan teroris pelintas batas ini harus selalu dalam pengawasan aparat keamanan (14,9 persen

responden). Kedua, semua kegiatan mereka harus dibuka dan diketahui warga di sekitarnya (7,7 persen responden).

Kekawatiran dan sikap yang ditunjukkan responden tersebut merefleksikan kepekaan publik terhadap isu terorisme. Peristiwa peledakan bom bunuh diri, yang marak beberapa waktu lalu, menimbulkan trauma publik yang cukup dalam terhadap terorisme. Rasa aman publik jelas terasik ketika mendengar wacana pemulangan eks kombatan NIIS yang dinilai terlatih melakukan kekerasan.

Rehabilitasi

Pemulangan teroris pelintas batas asal Indonesia ini akan selalu menjadi dilema berkepanjangan yang dihadapi pemerintahan. Sorotan sejumlah kelompok masyarakat yang mengungus isu pelanggaran hak asasi oleh pemerintah harus dihadapi dengan bijak. Bagi kelompok responden yang melihat masih

ada kemungkinan memulangkan mereka melandaskan pendapatnya pada alasan kemanusiaan dan tempat kelahiran mereka. Bahkan, jika masih ada opsi untuk memulangkan, pemerintah harus mengkalifikasi potensi rehabilitasi yang paling rasional dan tak mengancam keamanan nasional.

Perlakuan paling rasional, menurut responden, adalah para eks anggota NIIS ini harus menjalani proses hukum. Sebanyak 58,5 persen responden setuju mereka harus diadili terlebih dahulu jika dipulangkan. Perlakuan lain yang relatif aman bagi keamanan nasional adalah memulangkan anak balita teroris pelintas batas. Namun, yang lebih penting di mata responden ke depan adalah bagaimana pengamanan negeri ini dari terorisme. Untuk itu, ke depan program deradikalisasi harus lebih efektif mengatasi teroris.

(SULTANI/LITBANG KOMPAS)

**BCA**  
Senantiasa di Sisi Anda

**LE CORRE FRA**  
**FISHER AIS**

**SUPER LEAGUE TRIATHLON BALI**

**3-5 APRIL 2020**  
Ayodya Resort Bali, Nusa Dua



# NIIS Membuat Dunia Repot

Sejak jatuhnya Baghouz di dekat Sungai Eufrat ke tangan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Maret 2019, dunia segera mengantisipasi kombatan asing NIIS dan keluarganya yang akan kembali ke negara asal.

Musthafa Abd Rahman  
dari Kairo, Mesir

Baghouz adalah wilayah terakhir yang lepas dari kontrol kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah. Lepasnya Desa Baghouz itu menandakan bahwa NIIS tidak memiliki pijakan geografis lagi, baik di Suriah maupun Irak.

Cerita selanjutnya adalah anggota NIIS dan keluarganya menjadi buron Pasukan Demokratik Suriah (SDF), pasukan AS, pasukan Irak, dan pasukan Suriah. Sejak itu mulailah beredar berita tentang penangkapan anggota NIIS beserta keluarganya, baik di Suriah maupun Irak. Mereka dijebloskan ke kamp-kamp tahanan di Suriah timur dan timur laut yang berada di bawah kontrol SDF serta di beberapa tempat di Irak yang diawasi dan dikontrol pasukan Irak. Eropa menyambutnya dengan gembira sekaligus panik.

Pada tahun 2014-2015, warga asing yang menjadi anggota NIIS berasal dari 60 negara. Jumlah mereka diperkirakan sebanyak 25.000 personel. Sebanyak 3.000 orang di antaranya berasal dari Eropa. Namun, jumlah anggota NIIS dari warga asing diprediksi menurun seiring dengan kekalahan NIIS itu.

Pada Februari 2018, menteri pertahanan dari 14 negara—anggota koalisi internasional melawan NIIS—yang dipimpin AS menggelar pertemuan di Roma, Italia. Secara khusus mereka membahas nasib anggota NIIS beserta keluarganya pas-  
ca-kekalahan mereka.

AS dalam forum itu meminta agar anggota NIIS beserta keluarganya dipulangkan ke negara asal mereka melalui proses koordinasi dahulu dengan pemerintah negara asal, kecuali pimpinan NIIS. Mereka dikirim ke kamp tahanan AS di Guantanamo, Kuba.

Namun, Eropa saat itu menolak permintaan AS. Alasannya, kembalinya anggota NIIS ke negara asal akan mengancam keamanan dan mereka bisa setiap saat kembali beraksi.

Jumlah anggota NIIS asal Eropa cukup besar. Anggota asal Inggris sebanyak 500 personel, disusul dari Perancis (950), Belgia (650), Denmark (110), Swedia (300), Jerman (960), Belanda (120), Norwegia (140), Spanyol (50), Irlandia (60), Finlandia (45), Italia (90), Austria (60), Bosnia (380), Serbia (100), Kosovo (220), dan Albania (140). Eropa mengusulkan agar ribuan anggota NIIS itu dikirim ke Guantanamo.

Banyaknya perbedaan pendapat antara AS dan Eropa membuat pertemuan Roma saat itu akhirnya gagal mencapai kesepakatan. Pascapertemuan Roma, isu solusi masa depan bagi anggota NIIS dan keluarganya menjadi buntu.

## Dihukum

Di tengah kebuntuan nasib anggota NIIS itu, Irak mengusulkan agar anggota NIIS dan keluarganya di Suriah diseret ke meja pengadilan di Irak. Imbalannya, Irak mendapat kukuran dana 1 miliar dolar AS dari Eropa dan negara lain.

Pemerintah Irak berhak mendapat dana tambahan jika nanti anggota NIIS beserta keluarganya mendapat vonis hu-



Peserta aksi menuliskan pesan saat mengikuti demonstrasi yang menyerukan penolakan pemulangan sekitar 600 warga Indonesia yang bergabung sebagai milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Taman Pandang Istana, kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (10/2/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan tidak akan memulangkan mantan kombatan NIIS.

## sorotan manca

kuman penjara di Irak. Dana tambahan itu untuk biaya penjara anggota NIIS. Selain itu, SDF mengusulkan agar dibentuk pengadilan internasional yang khusus mengadili anggota NIIS yang ditahan SDF. Namun, Eropa tidak memberi respons positif atas usulan Pemerintah Irak ataupun SDF itu.

Operasi militer Turki ke Suriah timur laut untuk menumpas milisi Kurdi dari Unit Pelindung Rakyat (YPG), Oktober 2019, menguak lagi isu anggota NIIS dan keluarganya yang ditahan di kamp-kamp yang berada di bawah kontrol SDF. Milisi YPG adalah tulang punggung SDF.

## Kamp tahanan

Pasca-operasi militer Turki itu, kini ada tiga "tipe" kamp tahanan NIIS. Pertama, sebagian kamp tahanan beralih di bawah kontrol Turki setelah milisi YPG lari. Kedua, kamp tahanan yang tidak terjangkau serangan Turki tetap berada di bawah pengawasan SDF. Ketiga, kamp tahanan NIIS di Irak yang berada di bawah kontrol Pemerintah Irak.

Nasib tahanan di kamp yang dikontrol SDF dan Pemerintah Irak terkatung-katung. Sementara itu, Turki bersikeras memulangkan anggota NIIS dan keluarganya yang ditahan di kamp yang dikontrol Turki.

Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soyulu menegaskan, Turki akan memulangkan anggota NIIS ke negara-negara asal mereka. Soyulu mengklaim, Turki menahan 1.200 warga asing yang menjadi anggota NIIS, termasuk perempuan dan anak-anak.

Soyulu mengancam tindakan

Inggris, Belanda, dan negara Eropa lain yang mengagurkan kewarganegaraan warganya yang menjadi anggota NIIS hanya demi menghindari harus menerima mereka.

Soyulu mengancam akan tetap memulangkan mereka ke negara asal meskipun status kewarganegaraan mereka telah dicabut oleh pemerintah.

Di tengah sikap keras Turki itu, koalisi internasional melawan NIIS kembali bertemu. Pada 14 November 2019, mereka membahas lagi nasib kombatan asing NIIS dan keluarga mereka di Washington DC. Sebagian besar anggota koalisi, khususnya dari Eropa, tetap menolak menerima mereka.

Menyikapi hal itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam tetap memulangkan anggota NIIS asal Eropa dan keluarganya meskipun Eropa menolak menerima mereka. Ancaman itu menjadi kenyataan, Turki memulangkan anggota NIIS asal Eropa.

## Dipulangkan

Sejak 11 November 2019, Turki memulangkan secara bertahap anggota NIIS asal Eropa, Australia, dan AS beserta keluarga mereka. Turki telah memulangkan 9 anggota NIIS asal Jerman, 11 anggota NIIS asal Perancis, 2 orang asal Belgia, 2 orang asal Belanda, seorang asal AS, seorang asal Denmark, seorang asal Irlandia, seorang asal Australia, dan seorang asal Inggris.

Kepala Komite Antiteroris Tunisia Mokhtar Ben Nasr pada November lalu mengungkapkan, Tunisia telah menerima empat anggota NIIS dari Turki dan siap menerima lima anggo-

ta NIIS lagi dalam beberapa hari mendatang. Kuwait juga mengatakan telah menerima seorang anggota NIIS asal Indonesia. Mereka tersebar di beberapa lokasi, seperti di Irak, Suriah, dan Turki. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan kemungkinan memulangkan anak-anak usia di bawah 10 tahun yang dibawa orangtua mereka atau yang menjadi yatim piatu.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia belum menjelaskan, anggota NIIS asal Indonesia itu berada di kamp tahanan yang berada di bawah kontrol Turki, SDF, atau Pemerintah Irak.

**DOT MATRIX PRINTERS**  
**24-PIN**  
**LQ-590II/590IIN/LQ-2090II/2090IIN**

**BUILT FOR RELIABILITY**  
**ENGINEERED FOR CON**





---

# Pasca-penolakan Kombatan NIIS

## ANALISIS POLITIK

**J KRISTIADI**

*Peneliti Senior CSIS*



KUM

**K**etegasan pemerintah menolak pemulangan kombatan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang disertai konsiderasi kemungkinan memulangkan perempuan dan anak-anak di bawah umur 10 tahun mendapat dukungan berbagai kalangan masyarakat. Jajak pendapat *Kompas* (17 Februari 2020) menunjukkan, sebanyak 61,5 persen responden tidak setuju pemulangan WNI eks NIIS, 32,8 persen setuju pemulangan, dan sisanya menjawab tak tahu.

Meski demikian, agenda negara pasca-penolakan pemulangan kombatan itu jauh lebih kompleks, pelik, dan memerlukan kerja serius pemerintah dalam jangka panjang. Sebab, radikalisme adalah gerakan yang semangatnya berkiblat pada dalil utopis disertai adonan sentimen primordial, ras, suku, agama, serta nasionalisme eksklusif sebagai legitimasi ideologi.

Ia telah menjadi fenomena global yang mempergunakan sentimen primordialisme sebagai instrumen merebut kekuasaan negara. Gagasan itu menjadi sangat ampuh karena dikemas dengan realitas kesenjangan sosial ekonomi yang melebar serta menguatnya oligarki elite politik. Politik identitas bahkan sudah mengarah ke permusuhan antarwarga.

[Bersambung ke hlm 15 kol 6-7]

---



---

# Pasca-penolakan

(Sambungan dari halaman 1)

Fenomena itu bukan hal baru karena pada 1911 Robert Michels mengenalkan "hukum besi oligarki" dalam bukunya, *Political Parties*. Dalil klasik itu tetap aktual saat oligarki melanda jagat politik, pada tataran mondial ataupun politik domestik. Satu dasawarsa terakhir, oligarki elite penguasa menguat. Akibatnya, kepercayaan publik pada parpol, lembaga perwakilan rakyat, dan pemerintahan daerah sangat rendah. Tragedi demokrasi terjadi karena lembaga-lembaga politik tradisional korup dan makin memarjinalkan rakyat kecil.

Radikalisasi makin marak akibat gelombang populisme serta matinya akal sehat yang dicekik politik pasca-kebenaran. Perdebatan publik jadi sangat rumit dan mudah tersesat dalam idiom yang mengaburkan akal sehat. Kebohongan dipelintir sebagai kebenaran alternatif. Mereka juga menggali dasar-dasar "filosofis" dengan silat kata yang mengaburkan substansi, antara lain memperdebatkan hakikat kebenaran dengan merelatifisasi kebenaran menjadi beberapa jenis; kebenaran empiris, dogmatis, dan matematis.

Ketidakpercayaan publik atas lembaga yang bertugas melayani publik mendorong masyarakat mencari alternatif sendiri. Jawaban paling mudah dan simplistis adalah tawaran kebahagiaan kilat; asal bersedia mati dengan janji nikmat surgawi. Untuk itu, diperlukan legitimasi religi yang memudahkan penetrasi dalil-dalil anarki menjadi suara hati. Semakin tinggi tingkat pembusukan lembaga, semakin mudah masyarakat mengidap sindrom *ressentiment*, perasaan tak percaya diri, kecewa, dan rasa benci yang luar biasa. Sentimen perusak keharmonisan menjadi permanen karena pendidikan yang mematikan inderawi, persepsi, dan rasa kenyamanan hidup harmonis serta pembatinan dalil-dalil sesat.

Ancaman itu sangat serius. Karena itu, agenda negara ialah menjadikan masyarakat mempunyai kompetensi berwarga negara. Intinya, mengukir jiwa generasi muda agar memiliki tingkat militansi moral yang tinggi sehingga mampu merawat dan menjaga harmoni serta memuliakan kehidupan bersama. Derajat militansi mereka harus melampaui kadar semangat kelompok radikal yang mengancam musnahnya peradaban bangsa dan negara.

Pendidikan harus dimulai dari usia pra-rasional, biasa disebut pendidikan usia dini. Pada usia ini, anak-anak diasah rasa dan kepekaannya agar punya daya cecap tinggi terhadap keindahan keharmonisan, keselarasan, keteraturan, keterbiban, keadilan, kesederhanaan, dan keterbukaan. Pengalaman mereka mencecap kenyamanan mengelola hasrat mulia yang terbudayakan sejak usia dini akan menjadi kebiasaan (*habitus*) sehingga "otomatis" perilakunya terukur.

Berbuat baik dan bijak seperti halnya orang bernapas, tak perlu dipikir, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu resep ampuh memahat jiwa anak-anak ialah keteladanan orang-orang di sekitarnya, terutama orangtua. Kegagalan membentuk jiwa usia dini akan menjadikan rasionalitas sebagai budak hawa nafsu dan insting hewani, yang secara agresif akan bisa membuat saling memangsa sesamanya.